

DAFTAR PUSTAKA

BUKU & JURNAL:

- Alamsyah, Wana, 2020. *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020*. Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Amin, S.M. 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Artantojati, Sigit. 2010. *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice collaborators)*. Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1983. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Bina Cipta, Jakarta.
- _____. 2007. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Chaerudin DKK. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi, Adami. 2014. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Dempster, Quentin. 2006. *Whistleblower Para Pengungkap Fakta*. Elsam-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982. *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta.
- Diecy, A.V., 2007. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Terjemahan oleh Nurhadi, M.A. Nusamedia, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. 2015. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam Kuhp*. Sinar Grafika, Jakarta.

- _____. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2001. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jilid I)*. Pustaka Kartini, Jakarta.
- _____. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny. 2010. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Indawati, Syarifah Dewi. 2017. *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS)*. Universitas Sebelas Maret: Jurnal Verstek Vol. 5 No. 2.
- Junaidi, Soewartojo. 2005. *Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakan Serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*. Restu Agung, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010. *Buku Saku KPK RI tentang "Memahami Gratifikasi"*. Cetakan pertama. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 2000. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Naseh, Muhammad, dkk. 2019. *Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Indonesia dan Eropa*. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian: Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 8, No. 1.
- Makarao, M. Taufik dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Masriani, Yulies Tiena. 2020. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. PT. Alumni, Bandung.

- Mulyatno, 1980. *Asas-asas Hukum Pidana*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Muhammad, Rusli. 2015. *Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Islam Indonesia: Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 22, Edisi April.
- P.S, Ayu Diah dan Ni Nengah A. 2018. *Pengaturan Terhadap Saksi Peaku Yang bekerja sama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 5.
- Poernomo, Bambang. 1984. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Amarta Buku, Yogyakarta.
- Qordhawi. 1997. *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Armico, Bandung.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Santosa, Mas Achmad, 2011. *Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (justice collaborator)*, makalah disampaikan pada international workshop on the protection of whistleblower as justice collaborator, Jakarta.
- Semendawai, Abdul Haris, 2003. *Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana*. Stadium General Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jogjakarta.
- Soekanto, Soejono, 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Edisi Pertama. Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2021. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soesilo, R. 1982. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi penegak Hukum)*. Politeia, Bogor.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa, 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press, Makasar.
- Sofyan, Andy Muhammad, Abdul Asis, dan H. Amir Ilyas. 2020. *Hukum Acara Pidana: Edisi Ketiga*, Kencana, Jakarta.
- Sumaryanto, Djoko. 2013. *Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Prestasi Pustaka, Jakarta.

- Suryabrata, Sumadi, 1992. *Metode Penelitian*. Rajawali Press, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz, 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Tallesang, Sonda. Dr. Ismail Navianto, Abdul Madjid. 2014. *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*. Universitas Brawijaya: Jurnal Universitas Brawijaya, april 2014.
- Tim Redaksi Fokus Media. 2008. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak pidana Korupsi*. Fokus media, Bandung.
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materil*. Djambatan, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 1985. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Wijaya, Firman, 2012. *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*. Penaku, Jakarta.
- Wiyono, R. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____. 2006. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.
- Zed, Mestika, 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- INTERNET:
- Anonim, Apa Yang Dimaksud Dengan Pemerasan?, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pemerasan/3515> , Diakses Pada 30 September 2021 Pukul 03.10 WIB.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Kerugian Negara Akibat Korupsi di Indonesia, <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/ekonomi-bisnis/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia> Diakses Pada 13 november 2021 Pukul 10.23 WIB.
- Nisa Mutia Sari, Mengenal 7 Jenis Korupsi dan Contohnya yang Sering Dilakukan, <https://hot.liputan6.com/read/4161531/mengenal-7-jenis-korupsi-dan-contohnya-yang-sering-dilakukan#:~:text=Perbuatan%20curang%20yang%20dimaksud%20dalam,negara%20atau%20yang%20dapat%20membahayakan> , Diakses Pada 30 September 2021 Pukul 03.24 WIB.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

